

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia – Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wijayanti, Asri, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 11 September 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Oktober 2008.

D. Jurnal

Kasim, Umar, “Memaknai Putusan MK Register Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Kedudukan Hak Pekerja/Buruh dalam Kepailitan (Legal Opinion Putusan atas Uji Materiil Pasal 95 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Informasi Hukum*, Volume XVI, Nomor 3, September, 2014.

Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April, 2009.

E. Skripsi

Nelson, Dicky, 2015, *Kedudukan Upah Buruh dalam Kepailitan Pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Anggraini, Maya Neny, 2015, *Politik Hukum Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Penafsiran Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Hak Privilege Negara atas Utang Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

F. Internet

Pinakunary, Frederik J., *Perlindungan terhadap Perusahaan Solven dari Ancaman Kepailitan*, diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol13887/perlindungan-terhadap-perusahaan-solven-dari-ancaman-kepailitan> pada 27 September 2016 pukul 10.21 WIB.

G. Dokumen Lain

Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan